Article Info

Submitted: 8 Agustus 2019 | **Reviewed:** 16 Oktober 2019 | **Accepted:** 15 Desember 2019

PERLUASAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL KONSTITUSI

Oktavani Yenny¹

Abstract

Becoming one of the materials inside the fifth amendment of Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (The 1945 Constitution of Republic Indonesia), Constitutional Court authority now has become one of the essential concerns given that the function as "the guardian of the constitution" it became crucial in the protection of the constitutional rights of citizens. Along with times, violations of citizens constitutional rights are no longer based solely on legal norms, but violations committed against the application of norms by state institutions or public bureaucratic institutions (Constitutional Complaint). In addition, the need for institutions that deal with constitutional questions over the existence of a legal norms whose constitutionality is doubtful (Constitutional Question) as well as the authority of the Judicial Review carried out by institutions holding judicial power, called the Supreme Court and the Constitutional Court, led to a dualism of Judicial Review which turned out to be vulnerable to presenting legal issues. The methodology used in this study is normative juridical with a qualitative approach and using literatures. From the results of this study it was concluded that the need for additional of Constitutional Complaint and Constitutional Question authority as the authority of the Constitutional Court as well as a one-stop Judicial Review system in the Constitutional Court became very important carrying out its function as a guardian of the Constitution.

Keywords: *authority; constitutional court; guardian of the constitution*

Abstrak

Menjadi salah satu materi dalam Amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi kini menjadi salah satu perhatian penting karena mengingat fungsinya sebagai "the guardian of the constitution" menjadi krusial dalam perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Seiring dengan perkembangan zaman, pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara tidak lagi hanya berdasarkan pada norma hukum, namun pelanggaran yang dilakukan atas penerapan suatu norma oleh lembaga negara atau lembaga birokrasi publik (Constitutional Complaint). Selain itu, perlunya lembaga yang menangani pertanyaan-pertanyaan konstitusional atas keberadaan suatu norma hukum yang diragukan konstitusionalitasnya (Constitutional Question) serta kewenangan Judicial Review yang dijalankan oleh lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menimbulkan dualisme Judicial Review yang ternyata rentan menghadirkan persoalan hukum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlunya penambahan kewenangan Constitutional Complaint dan Constitutional Question sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi serta sistem satu atap Judicial Review di Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting sebagai bentuk pelaksanaan fungsinya sebagai pengawal Konstitusi.

Kata Kunci : *kewenangan; mahkamah konstitusi; pengawal konstitusi*

¹ Staff Hubungan Masyarakat dan Kerja sama Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Universitas Tanjungpura, Jln. Prof. Hadari Nawawi, Pontianak, 78124, Kalimantan Barat, Indonesia, email: oktavani.yenny@gmail.com, Tel./Fax. 08976589324.

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang dibentuk perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terlahir sebagai anak kandung reformasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki empat wewenang dan satu kewajiban berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945. Ide yang melatarbelakangi lahirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia secara simplistik (sederhana), menurut Jimly Asshiddiqie berkaitan erat dengan ide untuk mengembangkan fungsi pengujian Undang-Undang yang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam sejarah awal pembentukan negara Indonesia.²

Perjalanan Mahkamah Konstitusi sejak hari kelahirannya yaitu 13 Agustus 2003 telah memberikan nuansa tersendiri bagi kehidupan ketatanegaraan di negeri ini. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi berusaha mengawal Konstitusi agar dapat terlaksana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Putusan-putusan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak hanya dapat memenuhi rasa keadilan, namun

juga dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.³

Sejak berdiri pada 2003 hingga akhir 2018, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan tiga kewenangannya, yakni kewenangan melakukan pengujian undang-undang (PUU), sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN), dan peselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dua kewenangan lainnya, hingga detik ini belum pernah dilakukan. Yakni kewenangan memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan dalam proses pemberhentian presiden/wakil presiden dalam masa jabatannya. Kedua kewenangan ini belum pernah dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait dua perkara ini.

Kemudian dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi juga mengemban kewenangan untuk mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kepala Daerah). Namun sejak Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 pada Mei 2014, kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili PHP Kepala Daerah sifatnya

² Jimly Asshiddiqie. 2004. "Setahun Mahkamah Konstitusi: Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan", dalam *Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 4.

³ Mahkamah Konstitusi. 2018. Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, hlm. vii.

hanya sementara hingga terbentuknya badan peradilan khusus yang menangani perkara perselisihan hasil pilkada.⁴

Disamping baiknya kewenangan yang sudah dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, nyatanya masih ditemukan hak-hak warga negara yang belum terakomodir dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan terjadinya pelanggaran konstitusional terhadap hak warga negara namun belum adanya mekanisme peradilan yang dapat menanganinya serta terdapatnya suatu keraguan terhadap konstitusionalitas suatu undang-undang yang menjadi dasar hakim dalam mengadili suatu perkara. Istilah yang dikenal oleh beberapa negara untuk menjelaskan hal tersebut yakni *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*.

Constitutional Complaint adalah salah satu upaya hukum untuk menjamin agar proses-proses penyelenggaraan negara, baik dalam proses pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan tidak melanggar hak konstitusional warga negara.⁵ Dalam perkembangannya

Constitutional Complaint adalah suatu upaya hukum untuk menjamin tidak dilanggarnya hak konstitusional warga negara oleh seluruh kebijakan pemerintah maupun putusan peradilan.⁶

Sedangkan *Constitutional Question* adalah merujuk pada suatu mekanisme pengujian konstitusionalitas undang-undang dimana seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara menilai atau ragu-ragu akan konstitusionalitas undang-undang yang berlaku untuk perkara itu, maka ia dapat mengajukan “pertanyaan konstitusional” ke Mahkamah Konstitusi (mengenai konstitusional tidaknya undang-undang tersebut).⁷ Mahkamah Konstitusi hanya memutus persoalan konstitusionalitas undang-undang itu, bukan memutus kasus itu sendiri, namun selama Mahkamah Konstitusi belum menyatakan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus tersebut dihentikan.⁸

Namun yang menjadi permasalahannya saat ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia belum memiliki kewenangan dalam menangani *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*. Padahal

⁴ *Ibid*

⁵ Slamet Riyanto, “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional dengan Mekanisme *Constitutional Complaint* melalui Mahkamah Konstitusi”, <http://riyants.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 16 Maret 2020

⁶ Mahkamah Konstitusi. *Menggagas *Constitutional Complaint* di Indonesia*, Jakarta:

Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm 11.

⁷ Dewa Gede Palguna. 2010. *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 22.

⁸ *Ibid*

Constitutional Complaint dan *Constitutional Question* sudah menjadi hal urgen yang perlu ditangani. Selain itu, *Judicial Review* yang saat ini masih berada pada dua lembaga yang berbeda yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berpotensi menghadirkan permasalahan hukum. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya putusan yang berbeda antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Tentang Larangan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018 yang mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) yang melakukan uji materi terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat larangan pengurus partai politik menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dikeluarkannya dua putusan yang berbeda antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut justru menimbulkan kebingungan bagi KPU yang akan menyelenggarakan Pemilu harus mengikuti putusan Mahkamah Agung atau Putusan Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian singkat di atas maka penulis mengambil permasalahan sebagai berikut: (1) Apa Urgensi Pengaturan *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* serta sistem satu atap *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi? (2) Bagaimana Metode untuk memberikan kewenangan *Constitutional Complaint*, *Constitutional Question* dan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi?

II. Metode

Tulisan yang berjudul Restrukturisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi ini didasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

Dalam penelitian kali ini, penulis akan menganalisis kasus yang dibahas dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku, literatur-

⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *"Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)"*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.

literatur terkait dan bahan hukum sekunder lainnya yang mendukung dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Urgensi Pengaturan *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* Melalui Mahkamah Konstitusi serta sistem satu atap *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi.

Pada dasarnya hadirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan wujud negara Indonesia semakin menyadari akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Hal inipun kemudian tercermin dengan Mahkamah Konstitusi yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Dalam hal kewenangannya mengadili perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi sebanyak 1.966 perkara dan telah mengeluarkan sebanyak 1.266 putusan.¹⁰

Semakin tingginya jumlah permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi berdampak pada berbagai macam peristiwa ketatanegaraan yang tidak terselesaikan, telah mampu dijawab oleh Mahkamah Konstitusi melalui

putusannya. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai “pemecah kebuntuan” ketatanegaraan tentu saja tidak selalu didukung oleh masyarakat. Pro dan kontra selalu melengkapi hadirnya putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi di negeri ini.

Tingginya jumlah permohonan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat sepenuhnya diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini dikarenakan terjadinya beberapa kasus yang merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara namun tidak dapat ditangani oleh Mahkamah Konstitusi karena belum adanya kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk menanganinya. Padahal bila melihat jumlah permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang merupakan permohonan *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*, jumlahnya menunjukkan urgensi perlunya Mahkamah Konstitusi untuk menangani permohonan-permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran Pan Mohamad Faiz terhadap surat maupun permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selama tahun 2005, ada 48 surat ataupun permohonan yang dapat

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, “*Rekapitulasi Perkara*”, *Serial Online*, (Cited, 2020, Maret,15), Available from: URL

<http://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&Menu=4>.

dikategorikan sebagai bentuk *Constitutional Complaint*. Jumlah itu tiga kali lipat jumlah permohonan *Judicial Review* yang masuk ke Mahkamah Konstitusi pada tahun yang sama. Artinya, jumlah tersebut setidaknya menunjukkan kebutuhan warga negara untuk menyalurkan *Constitutional Complaint* dalam rangka mempertahankan hak konstitusionalnya menjadi penting dan mendesak.

Beberapa contoh kasus tersebut, yaitu terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di propinsi Jawa Timur.¹¹ Secara konstitusional, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.¹² Sehingga Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur itu melanggar hak kebebasan berkeyakinan termasuk kebebasan beribadat sesuai keyakinannya.

Kasus lainnya, seperti dikemukakan oleh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, adalah putusan peninjauan kembali kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir Said Thalib dengan

terpidana Pollycarpus.¹³ Mahfud menilai, putusan peninjauan kembali yang menghukum Pollycarpus keliru karena peninjauan kembali diajukan jaksa penuntut umum setelah proses kasasi Mahkamah Agung membebaskan Pollycarpus. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Pasal 263 ayat (1), disebutkan, "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung."

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hanya terdakwa atau ahli warisnya yang berhak mengajukan peninjauan kembali. Namun dalam kasus Pollycarpus, jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga Pollycarpus merasa divonis dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, dan dapat ditangani bilamana tersedia mekanisme pengaduan konstitusional atau *Constitutional Complaint*.

Tidak hanya kasus-kasus tersebut yang menjadi perhatian

¹¹Moh. Mahfud MD. 2010. *"Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu"*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 286-287.

¹² Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³ *Op.cit.*, hlm. 288.

penting akan perlunya mekanisme *Constitutional Complaint*. Terdapat beberapa perkara yang mendapat perhatian luas yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain: pertama, Perkara Nomor 016/PUU-I/2003 yang merupakan permohonan pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang diajukan oleh Main Bin Rinan. Mahkamah dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Kedua, Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 yang merupakan permohonan pembatalan dua Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang saling bertentangan yang diajukan oleh CDR. H.R. Prabowo Surjono. Dalam Amar Putusannya Mahkamah berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima.¹⁴

Ketiga, Perkara Nomor 004/PUU-III/2005 dengan pokok perkara Pegujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab VI Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Permohonan diajukan oleh Melur Lubis Yang dalam permohonannya

tersebut dinyatakan adanya dugaan unsur penyuapan dalam putusan Mahkamah Agung. Dalam Amar Putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Keempat, Perkara Nomor 013/PUU-III/2005 dengan pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap UUD NRI Tahun 1945. Permohonan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP PELRA) yang dalam permohonannya menyatakan terjadi penyimpangan penerapan norma undang-undang. Dalam Amar Putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan tidak dapat diterima.¹⁵

Kelima, Perkara Nomor 018/PUU-III/2005 dengan pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Permohonan yang diajukan oleh Ruyandi M. Hutasoit ini dalam permohonannya menyatakan terjadi penafsiran yang keliru dalam penerapan undang-undang. Dalam Amar Putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa Permohonan tidak

¹⁴Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, "*Putusan Mahkamah Konstitusi*", Serial Online, (Cited, 2020, Maret,15), Available from: URL: <http://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=>

¹⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, "*Putusan Mahkamah Konstitusi*", Serial Online, (Cited, 2020, Maret,15), Available from: URL: <https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=013%2FPUU-III%2F2005+>

dapat diterima. Keenam, Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 dengan pokok perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD NRI Tahun 1945. Permohonan diajukan oleh F.X. Cahyo Baroto yang dalam permohonannya menyatakan terdapat ketidakpastian penanganan perkara di peradilan umum dan dugaan adanya unsur penyuapan. Dalam Amar Putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.¹⁶

Ketujuh, Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 (laporan temuan pelanggaran pemilihan kepala daerah yang tidak ditindaklanjuti) dan Kedelapan, Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009 (kriminalisasi pimpinan KPK).¹⁷

Melihat substansi permohonan pemohon tersebut secara garis besar merupakan perkara *Constitutional Complaint*. Permasalahan dalam perkara tersebut antara lain mengenai

implementasi undang-undang, kebijakan pemerintah yang melanggar hak konstitusional, putusan peradilan umum yang saling bertentangan, dugaan penyimpangan dalam penegakan hukum hingga kelalaian pemerintah dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden yang mana hal-hal tersebut merupakan beberapa Perkara Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang secara substansi lebih ke arah *Constitutional Complaint*.

Beralih dari kasus-kasus yang merupakan bentuk *Constitutional Complaint*, kewenangan *Constitutional Question* menjadi kewenangan yang tidak kalah pentingnya untuk dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kasus Egi Sudjana atau Zinal Maarif yang diajukan ke pengadilan dengan dakwaan mencemarkan nama baik presiden yang menimbulkan kontroversi karena ada yang mempersoalkan bahwa pasal-pasal KUHP yang dijadikan dasar dakwaan itu adalah inkonstitusional.¹⁸

¹⁶Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, "Putusan Mahkamah Konstitusi", Serial Online, (Cited, 2020, Maret, 16), Available from: URL : <https://mkri.id/index.php?page=web.putusan&iid=1&kat=1>

¹⁷ Farid Ibrahim, *Penambahan Kewenangan Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Terhadap Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Penegakan Hak-Hak Konstitusional*, <https://Penambahan Kewenangan Pengadu>

an Konstitusional Constitutional Complaint Terhadap Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Penegakan Hak-Hak Konstitusional A dditional Constitutional Complaint To Constitutional Court As Form Of Enforcement Of Constitutional Rights, diakses pada tanggal 16 Maret 2020.

¹⁸ Asmaeny Azis dan Izlindawati, 2018, "*Constitutional Complaint dan Constitutional Question* dalam Negara Hukum", Jakarta, hal. 201

Akan tetapi, karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menangani *Constitutional Question* dalam perkara ini, maka kasus tersebut diputus tanpa mempersoalkan konstitusionalitas pasal-pasal KUHP tersebut.¹⁹ Padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 013-022/PUU-VI/2006 menguraikan terjadinya *Constitutional Question* sebagai berikut :

“Apabila seorang hakim (di luar hakim konstitusi) meragukan konstitusionalitas suatu norma hukum yang hendak diterapkan dalam suatu kasus kongkret, maka sebelum memutus kasus dimaksud, hakim yang bersangkutan mengajukan permohonan (pertanyaan) terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi perihal konstitusionalitas norma hukum tadi”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa penerapan mekanisme *Constitutional Question* di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang mengada-ada untuk menciptakan kehidupan ketatanegaraan yang progresif dan berkelanjutan (*Progressive and Sustainable*).

Fakta empirik tersebut timbul karena adanya upaya warga negara untuk melakukan pengaduan melalui mekanisme *Constitutional Complaint*

dan pertanyaan konstitusional melalui *Constitutional Question* kepada Mahkamah Konstitusi sebagai muara perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara yang merupakan salah satu bentuk dari fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian Of The Constitution*).

Selain belum terakomodirnya kepentingan warga negara karena belum dimilikinya kewenangan *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* oleh Mahkamah Konstitusi, salah satu poin mendasar dari amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diadopsinya dualisme *Judicial Review* yang dijalankan oleh lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ternyata rentan menghadirkan persoalan hukum.²⁰

Mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Antoni Putra. 2018. “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (2), hlm. 69.

peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dapat dikatakan sebagai upaya pengujian legalitas (*legal review*). Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini jelas berbeda dari pengujian konstitusional (*constitutional review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, objek yang diuji hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang (*judicial review of regulation*). Sedangkan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang (*judicial review of law*) dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.²¹

Kedua, yang dijadikan batu penguji oleh Mahkamah Agung adalah Undang-Undang, bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian norma hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas peraturan (*judicial review on the legality of regulation*), sedangkan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang (*judicial review on the constitutionality of law*) yang terakhir ini biasa disebut juga dengan istilah pengujian konstitusionalitas atas

Undang-Undang (*constitutional review of law*).²²

Ketiga, Pengujian yang dilakukan di Mahkamah Agung terkadang tidak sejalan dengan putusan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi dengan artian bahwa Undang-Undang yang diputus Mahkamah Konstitusi terkadang masih menjadi polemik oleh Mahkamah Agung baik dari segi waktu dan materi yang diputuskan.²³

Konsistensi pelaksanaan juga merupakan persoalan penting untuk mencapai keadilan norma yang berjenjang. Sengketa norma sepertinya tidak bermasalah dalam praktik peradilan, baik pada lembaga Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Akan tetapi, berbeda halnya jika norma hukum yang diberikan oleh putusan pengadilan bertolak belakang.

Persoalan akan timbul apabila pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang tengah berlangsung di Mahkamah Agung, sementara undang-undang yang menjadi batu uji juga tengah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka menjadi tidak relevan permohonan *Judicial Review* di Mahkamah Agung tersebut tetap dilaksanakan, sebab undang-undang

²¹ Jimly Assiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hlm.158.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

yang dijadikan batu uji sudah dinyatakan tidak dapat lagi berlaku.²⁴

Hal ini dikarenakan selama enam belas tahun Mahkamah Konstitusi berdiri terdapat beberapa putusan berbeda yang dikeluarkannya dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Dianutnya sistem dualisme *Judicial Review* didua lembaga berbeda nyatanya menimbulkan dampak negatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Implikasi dari adanya dualisme Jucial Review ini yakni terdapat beberapa putusan yang berbeda antara Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa contoh kasus tersebut yakni pada Tahun 2009, melalui Putusan Nomor 15 P/HUM/2009 bertanggal 18 Juni 2009, Mahkamah Agung menyatakan Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumpulan Hasil Pemilihan Umum, Tata cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan Pasal 205 ayat

(4) dan Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2008 (UU 10/2008).²⁵

Dalam waktu tidak terlalu lama, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 110, 111, 112, 113/PUUVII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 menyatakan Pasal 205 ayat (4) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 konstitusional bersyarat. Kedua Pasal tersebut terkait dengan mekanisme hukum dalam perhitungan kursi tahap II. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi mengukuhkan pasal tersebut sepanjang sesuai ketentuan yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi sekaligus mementahkan Putusan MA terkait pembatalan penghitungan kursi tahap dua. Tentu saja kemudian, Putusan Mahkamah Konstitusi yang diberlakukan.²⁶

Meskipun secara normatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (*a quo* badan peradilan dibawahnya) memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain. Namun dalam implementasi kewenangannya tersebut seringkali terdapat hubungan terkait batasan-batasan wewenang, bahkan sering terjadi persinggungan. Misalnya dalam hal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, pada beberapa kasus tidak diikuti oleh putusan Mahkamah Agung.

Apabila kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi

²⁴ Antoni Putra, *Ibid*, hal.70

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*.

dirinci dan kemudian ditautkan dengan kewenangan Mahkamah Agung maka menurut Mahfud MD tampak ada persilangan kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi mengadili konflik peraturan yang bersifat abstrak sekaligus mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret. Ada pun Mahkamah Agung juga mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret sekaligus mengadili konflik antar peraturan yang bersifat abstrak.²⁷

Dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan misalnya. Disini tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian tetapi dengan tingkatan yang berbeda.²⁸

Diantara Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diikuti secara serta merta oleh Mahkamah Agung semisal tentang eksistensi konstitusionalitas pidana mati, sifat melawan hukum materiil pada tindak

pidana korupsi, tidak sah dan mengikat ancaman pidana pasal 76 dan Pasal 79 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Peninjauan Kembali perkara pidana yang dapat berkali-kali, dan lain-lain.

Fenomena praktek peradilan dimana tidak terlaksanakannya atau tidak diikutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung ini menimbulkan sebuah asumsi bahwa meskipun sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara umum (*erga omnes*) serta setara dengan undang-undang (*negatif legislator*), ternyata tidak serta merta dapat mengikat atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.²⁹

Secara asas, Hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya bukanlah corong undang-undang, karenanya memiliki kewenangan melakukan penafsiran terhadap undang-undang (pun juga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi) untuk diterapkan terhadap perkara yang ditanganinya. Apalagi dalam konteks *law in konkreto*, para Hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnyalah yang menerapkan dan

²⁷Moh. Mahfud MD. 2014. "Titik Singgung wewenang antara MA dan MK". Makalah Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 13 November, hlm. 8.

²⁸ *Ibid*, hal.9

²⁹ Budi Suhariyanto. 2016. Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI, hlm. 173-174.

mengkontekstualisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kasus dan fakta perkara yang ditanganinya.

Untuk itu, melihat terdapatnya kekurangan dengan penerapan sistem *dualisme Judicial Review* ini, maka Kewenangan *Judicial Review* lebih baik bila sepenuhnya berada di Mahkamah Konstitusi, sementara Mahkamah Agung hanya fokus mengadili perkara yang berkaitan dengan keadilan individu dan/atau badan hukum yang bersifat konkrit.

Berdasarkan pemaparan yang penulis sampaikan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 24 C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, nyatanya belum mampu mengakomodir hak-hak warga negara karena masih terdapat hal-hal yang belum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi namun telah

menjadi hal yang urgen dan perlu ditangani.

B. Metode Untuk Memberikan Kewenangan *Constitutional Complaint*, *Constitutional Question* dan *Judicial Review* Kepada Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan tentang urgensi *Constitutional Complaint*, *Constitutional Question* serta sistem satu atap *Judicial Review*, maka perlu diketahui bagaimana mekanisme penyelesaian *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* yang akan menjadi salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan perluasan kewenangan *Judicial Review* hanya di Mahkamah Konstitusi. Pemberian kewenangan tersebut dapat dilakukan dengan cara yakni :

1. Penambahan Terbatas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dengan Mengamandemen UUD NRI Tahun 1945

Aplikasi suatu konsep baru pada dasarnya harus disertai dengan melakukan adaptasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem yang sudah ada. Hal tersebut sangat penting karena dikhawatirkan apabila aplikasi konsep tanpa suatu adaptasi justru dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem asli yang sudah ada.

Begitu juga dengan wacana akan diterapkannya konsep *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* kedalam salah satu bagian sistem

hukum di Indonesia serta akan diberlakukannya sistem satu atap dalam *Judicial Review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sistem hukum yang dimaksud adalah suatu sistem yang sudah ada terlebih dahulu diranah hukum Indonesia dimana dalam hal ini sistem tersebut mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan apabila nantinya diterapkan *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* serta sistem satu atap *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Penjelasan yang telah penulis paparan sebelumnya, maka penting kemudian untuk mengetahui bagaimana mekanisme untuk meletakkan kewenangan ini kepada Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya yang telah diatur secara limitatif didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara formal, tidak mungkin untuk memberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mengadili perkara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan untuk melakukan

perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan hanya tidak mudah secara politis tetapi juga secara prosedural.³⁰

Pertanyaannya kemudian, mungkinkah kewenangan akan tetap diberikan ke Mahkamah Konstitusi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu kita ketahui bersama bahwa sulitnya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelumnya dikarenakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirasakan telah mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan warga negara.

Namun, seiring perkembangan zaman, hal-hal yang terdapat didalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dirasa perlahan sudah mulai ketinggalan zaman, maka untuk menanggapi hal tersebut beberapa tahun belakangan ini MPR mengkaji mengenai Perubahan kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang nyatanya perlu untuk diamandemen agar lebih komprehensif

³⁰ Dewa Gede Palguna., 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran hak-hak*

Konstitusional Warga Negara, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 594.

dan mengakomodir hal-hal yang kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dengan Undang-Undang.

Melihat hal tersebut, maka penulis mengusulkan bahwa salah satu materi perubahan dalam amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 nanti juga memuat mengenai penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diatur didalam Pasal 24 C Ayat (1) yang menurut penulis lebih ideal bila berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan atau Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan mengadili perkara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*”.

Selain Pasal 24 C Ayat (1) yang akan diubah, maka konsekuensi logis dengan sistem satu atap *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, ialah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung juga perlu dilakukan perubahan. Didalam Pasal 24 A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Mahkamah Agung

berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.” Maka dengan adanya perubahan sistem dualisme *Judicial Review* menjadi sistem satu atap di Mahkamah Konstitusi, kewenangan Mahkamah Agung yang diatur didalam Pasal 24 A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan berubah menjadi “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang” sehingga Mahkamah Agung tidak lagi berwenangan dalam menangani *Judicial Review* melainkan menangani hal-hal konkret yang berkaitan dengan keadilan individu dan/atau badan hukum.

Hadirnya amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 maka akan sangat dimungkinkan untuk menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* serta pemberlakuan sistem satu atap *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi untuk menjawab dan mengatasi permasalahan yang telah dialami oleh warga negara Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

2. Penambahan kewenangan Penyelesaian *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* serta sistem satu atap *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi.

Telah diuraikan sebelumnya, salah satu konsep ideal untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* serta penerapan sistem satu atap *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi adalah melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Implikasi dari dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perlu dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Penghapusan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bertambahnya kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* serta sistem satu atap *Jucial Review* di Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) tersebut akan berubah menjadi :

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang dan atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- c. Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- d. Mengadili perkara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*.

Berubahnya kewenangan Mahkamah Konstitusi didalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi, maka hal ini berimplikasi perlunya penegasan kewenangan Mahkamah Agung yang tidak lagi mencakup kewenangan dalam melakukan *Judicial Review*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghapus Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

- (1.) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang
- (2.) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atasalasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3.) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.

Penghapusan pasal tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung tidak lagi memiliki kewenangan dalam menangani *Judicial Review*, sehingga kewenangan *Judicial Review* sepenuhnya berada di Mahkamah Konstitusi.

VI. Penutup

Dalam perjalanan sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, berdirinya Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 hingga tahun 2019 telah banyak memberikan pengaruh yang besar bagi para pencari keadilan. Penulis menyimpulkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur didalam UUD NRI Tahun 1945 masih belum sepenuhnya dapat mengakomodir kepentingan-kepentigngan warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. Kebutuhan akan hadirnya mekanisme *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* dalam memperjuangkan hak konstitusional warga negara kini dirasa sudah sangat urgen untuk segera diatasi.

Selain itu, terjadinya beberapa putusan berbeda antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan dampak dari dianutnya sistem dualisme *Judicial Review* yang berdampak membingungkan masyarakat sudah semestinya menjadi

perhatian penting. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang sejajar dengan kewenangan berbeda. Namun dalam prakteknya terdapat hubungan dan titik singgung wewenang diantara keduanya. Bahkan terkadang berpotensi menimbulkan disharmonisasi penegakan hukum.

Sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat saat ini, perlu kiranya untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* serta penerapan sistem satu atap *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi.

Bibliografi

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly. 2004. "Setahun Mahkamah Konstitusi : Refleksi Gagasan dan Penyelenggaraan", dalam *Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Menjaga Denyut Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- . 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Aziz, Asmaeny dan Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint dan Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 2018. *Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.
- . . *Menggagas Constitutional Complaint di Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- MD, Moh. Mahfud. 2010. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Palguna, I Dewa Gede. 2010. *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suhariyanto, Budi. 2016. *Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI.

Jurnal:

Antoni Putra. 2018. "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (2).

Makalah:

MD, Moh. Mahfud. 2014. "Titik Singgung wewenang antara MA dan MK". *Makalah Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 13 November .

Internet:

Asshiddiqie, Jimly,
[Http://Www.Jimlyschool.Com/Read/Analisis/238/Kedudukan-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Struktur-Ketatanegaraan-Indonesia/](http://www.jimlyschool.com/Read/Analisis/238/Kedudukan-Mahkamah-Konstitusi-Dalam-Struktur-Ketatanegaraan-Indonesia/).

Ibrahim, Farid, Penambahan Kewenangan Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*) Terhadap Mahkamah Konstitusi Sebagai Bentuk Penegakan Hak-Hak Konstitusional,
[https://Penambahan Kewenganan Pengaduan Konstitusional C onstitutional Complaint Terhada p Mahkamah Konstitusi Sebag ai Bentuk Penegakan HakHak](https://PenambahanKewenanganPengaduanKonstitusionalConstitutionalComplaintTerhadapMahkamahKonstitusiSebagaiBentukPenegakanHakHak)

Konstitusional Additional Consti tutional Complaint To Constituti onal Court As Form Of Enforc ement Of Constitutional Rights

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, "Rekapitulasi Perkara", Serial Online, (Cited, 2019, Oktober,15), Available from: URL <http://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&Menu=4>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, "Putusan Mahkamah Konstitusi", Serial Online, (Cited, 2019, Oktober,15), Available from: URL: [http://www.https://mkri.id/index.p hp?page=web.Putusan&id=1&ka t=1&cari](http://www.https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, "Putusan Mahkamah Konstitusi", Serial Online, (Cited, 2019, Oktober,15), Available from: URL : [https://mkri.id/index.php?page=w eb.Putusan&id=1&kat=1&cari=01 3%2FPUU-III%2F2005](https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=013%2FPUU-III%2F2005)

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, "Putusan Mahkamah Konstitusi", Serial Online, (Cited, 2019, Oktober,15), Available from: URL : [https://mkri.id/index.php?page=w eb.putusan&id=1&kat=1](https://mkri.id/index.php?page=web.putusan&id=1&kat=1)

Riyanto, Slamet, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional dengan Mekanisme *Constitutional*

Complaint melalui Mahkamah
Konstitusi”,
<http://riyants.wordpress.com/>.